

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.

Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang sistemik dan menyeluruh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia (Sumanta, 2005). Lingkaran kemiskinan ini disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terciptanya tingkat pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. Pertama, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. Kedua, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah. Logika berpikir yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia. Sebuah pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa negara miskin karena tidak punya apa-apa, dan tidak punya apa-apa yang menyebabkan negara menderita kemiskinan. Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu (Agus Suman, 2006):

1. Menggali potensi kekayaan alam.
2. Meningkatkan produktivitas kerja.
3. Menggiatkan masyarakat untuk menabung.
4. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Banyak pihak yang salah persepsi mengenai kemiskinan, yaitu kesejahteraan erat kaitannya dengan keterampilan yang dimilikinya yang diartikan, kesejahteraan hidup tidak bisa terwujud jika seseorang tidak memiliki keterampilan. Atas dasar ini, setiap pemberi dana atau modal tidak akan memberikan pinjaman modal kepada seseorang yang tidak terampil, kecuali orang tersebut diberi pelatihan terlebih dahulu. Keterampilan akan muncul dengan sendirinya, melalui adanya modal dan usaha yang dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) adalah program nasional dalam mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pada tahun 2007 program ini bernama P2KP (Proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan) dan berganti nama menjadi PNPM

Perkotaan ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) sejak tahun 2008. Penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia jelas tidak hanya menjadi milik perdesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan. Kemiskinan kota sebagai bagian dari kemiskinan nasional di Indonesia juga menjadi masalah yang cukup akut untuk ditangani. Sebagai warisan dan historis yang sudah berabad-abad, sejak munculnya kota itu sendiri, kaum miskin perkotaan menjadi sebuah fenomena masalah sosial yang memprihatinkan, dengan tingkat penanggulangan yang lebih memprihatinkan, seolah-olah kemiskinan itu sendiri bersifat abadi, lestari dan tidak bisa dirubah lewat aksi maupun reformasi apapun. Kota-kota di Indonesia yang sekilas kelihatan sebagai simbol kemajuan dan budaya yang lebih maju dan seharusnya demikian, ternyata masih dipenuhi oleh problem kemiskinan dengan segala masalah sosial yang disebabkan atau berdampingan dengan masalah sosial lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNIMED Jurusan PPKn (2005 : 10) dituliskan bahwa : “Identifikasi masalah berisi sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang masalah atau kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup masalah yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan masalah”. Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Penanggulangan kemiskinan hendaknya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat. Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Ada perbedaan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010.
4. Dampak PNPM Mandiri menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat miskin.
5. Peran masyarakat dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilingkungannya.

## **C. Pembatasan Masalah**

“ Dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Pencapaian meningkatkan Kesejahteraan rakyat”

#### **D. Perumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terarah maka perlu adanya perumusan masalah. Berdasarkan kutipan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan Di Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Menetapkan tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting sebab dalam bertindak atau untuk melakukan suatu kegiatan harus disertai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian juga halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan. Sebagaimana dengan dikemukakan oleh Arikunto (2003 : 19) mengatakan : “ Apabila problematika penelitian sudah berhasil diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan penelitian apabila problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan penelitiannya maka tujuan penelitiannya menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh. Oleh karena itu antara problematika dengan tujuan penelitian terdapat hubungan rumusan yang sangat erat”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Mewujudkan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.

## **F. Manfaat Penelitian**

a. Bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pematangsiantar

a. Untuk dijadikan bahan masukan dalam menjalankan tugas dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khusus nya sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan strategi dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat kota Pematangsiantar.

c. Untuk lebih mengembangkan strategi untuk mendorong proses terjadinya transformasi sosial di masyarakat.

b. Bagi Peneliti

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang PNPM Mandiri.

b. Manfaat Praktis

1) Penulis dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam mensejahterakan masyarakat

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

- c. Bagi Masyarakat
  - a. Agar masyarakat dapat memahami bagaimana proses ambil bagian dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
  - b. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.
  - c. Menjadi suatu bahan bacaan yang bermanfaat di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
  - d. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.